



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 November 1961

Nomor : 2183/P/3523/M/1961
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pengawasan terhadap perkara-
perkara yang dimintakan per-
adilan dalam tingkat banding.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 7 Tahun 1961

Apabila terhadap putusan Pengadilan Negeri diminta peradilan dalam tingkat banding, maka berkas perkara yang bersangkutan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi dalam perkara :

Pidana : berdasarkan pasal 10 (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 No. 1 dalam tempo selambat-lambatnya 5 (lima) minggu ;

Perdata : Di Jawa-Madura berdasarkan Pasal 11 (2) Undang-undang tahun 1974 No. 20 dalam tempo 30 hari ;

di luar Jawa-Madura dalam tempo-tempo yang dimaksudkan dalam pasal 203 *Rechtsreglement Buitengewesten*.

Pada umumnya Pengadilan Tinggi baru mengetahui tentang adanya permintaan banding tersebut, setelah berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi, sehingga pengawasan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan-Pengadilan Negeri mengenai perkara-perkara yang dimintakan banding tidak dapat dilakukan.

Oleh karena sering terjadi, bahwa pengiriman berkas-berkas perkara oleh Pengadilan-pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi sangat terlambat, maka kepada para Hakim pada Pengadilan-Pengadilan Negeri diinstruksikan supaya perkara-perkara yang dimintakan banding itu segera diselesaikan (*gemimuteerd*) agar perkara-perkara itu dalam tempo yang ditentukan dalam Undang-undang dapat dikirim kepada Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya juga acap kali terjadi, bahwa kepada terhukum (dalam perkara pidana) belum diberi kesempatan melihat berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi, maka kelalaian itu hendaknya jangan terulang lagi.

Untuk memberi kesempatan kepada Pengadilan Tinggi mengawasi perkara-perkara yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding, maka dengan ini diinstruksikan kepada semua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia supaya mulai dengan bulan JANUARI 1962 membuat dan mengirim daftar bulanan khusus seperti contoh terlampir, kepada Pengadilan Tinggi, dimana Pengadilan-pengadilan Negeri itu termasuk dalam daerah hukumnya, - dan kepada Mahkamah Agung.

Dalam pengisian tiap-tiap bulan daftar bulanan itu hendaknya diperhatikan juga hal-hal yang akan disebut di bawah ini :

- a. dalam laporan yang pertama hendaknya disebut keadaan sampai akhir bulan Desember 1961.
- b. tiap-tiap laporan bulanan berikutnya harus pula disebut tunggakan perkara banding yang belum diselesaikan dan belum dikirim kepada Pengadilan Tinggi dari bulan yang sebelumnya dan catatan ini dapat dimuat dalam ruangan "Penjelasan".

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)

LAPORAN BULANAN DARI PENGADILAN NEGERI
 TENTANG PERKARA-PERKARA PIDANA/EKONOMI YANG DIMOHONKAN BANDING KEPADA PENGADILAN TINGGI

No. Urut	Nomor Perkara	Nama Hakim Yang Memutus	T a n g g a l			Lama/banyaknya hukuman/denda atau pembebasan	Terdakwa ditahan/tidak sejak - hingga	Penjelasan
			Putusan	Permintaan Banding	Dikirim ke Pengadilan Tinggi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Ketua Pengadilan Negeri

(.....)

**LAPORAN BULANAN DARI PENGADILAN NEGERI
TENTANG PERKARA-PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN BANDING KEPADA PENGADILAN TINGGI**

No. Urut	Nomor Perkara	Nama Hakim Yang Memutus	T a n g g a l			G u g a t a n			Putusan dijalankan		Penjelasan
			Putusan	Permintaan Banding	Dikirim ke Pengadilan Tinggi	Tidak diterima	Dikabulkan	Ditolak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
Ketua Pengadilan Negeri

(.....)